Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat

Santi Arafah, Universitas Potensi Utama

Jeroh Miko, Universitas Potensi Utama

Ria, Universitas Potensi Utama

Abstract:

The purpose of this community service activity is to educate the role of Islamic financial inclusion in improving the economic stability of the community. The implementation method includes three stages, namely observation, delivery of material and evaluation to the youth of the Jami' Ulayat Percut Sei Tuan Mosque for three months. The results of this service the participants began to understand the meaning of Islamic financial inclusion, namely the availability of access to appropriate Islamic financial products including financing, savings, insurance and payments, the availability of quality access including convenience, affordability, suitability and with due regard to consumer protection and the availability is also given to everyone. Islamic financial inclusion aims to change the mindset of business actors about how to see money and profit, with this mindset it will change economists to be responsive. Islamic financial inclusion is included in the Islamic financial literacy program, because if the increase in Islamic financial inclusion increases, it will increase the economic stability of society for a country.

Keywords: Islamic Financial Inclusion, Economic Stability

Abstrak:

Tujuan kegiatan pengabdian ini ialah untuk mengedukasi peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi tiga tahap, yaitu observasi, penyampaian materi dan evaluasi pada para remaja Masjid Jami' Ulayat Percut Sei Tuan selama tiga bulan. Hasil dari pengabdian ini para peserta mulai memahami pengertian inklusi keuangan syariah yaitu ketersediaan akses terhadap produk keuangan syariah yang sesuai termasuk pembiayaan, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Inklusi keuangan syariah ini bertujuan untuk mengubah pola pikir pelaku usaha tentang cara melihat uang dan laba, dengan pola pikir tersebut maka akan mengubah pelaku ekonom menjadi *responsive*. Inklusi keuangan syariah termasuk dalam program literasi keuangan syariah, dikarenakan jika peningkatan inklusi keuangan syariah semakin meningkat maka akan meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat bagi suatu negara.

Kata kunci: Inklusi Keuangan Syariah, Stabilitas Ekonomi

Email : santiarafah@gmail.com

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan syariah adalah indikator penting yang berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat umum (Puspitasari *et al.*, 2020). Dalam perspektif Islam pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan yang bertujuan pada kestabilan perekonomian di Indonesia (Hidayanti, 2018); (Islamiah, 2021). Peran institusi perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memegang peranan yang vital dalam mewujudkan program nasional ini (Sa'adah & Sopingi, 2019). Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan

tugas Bank Indonesia dan perbankan nasional baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makprudensial. Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional (Puspitasari *et al.*, 2020); (Rosidayanti *et al.*, 2023).

Inklusi keuangan syariah dapat diartikan sebagai akses terhadap produk keuangan syariah yang sesuai termasuk pembiayaan, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang (Laili & Kusumaningtias, 2020); (Sopingi *et al.*, 2023). Menurut (Wulandari, 2019) bahwa inklusi juga dapat merubah pola pikir pelaku usaha tentang cara melihat uang dan laba, dengan pola pikir tersebut maka akan merubah pelaku ekonomi menjadi *responsive*. Penggunaan fasilitas lembaga keuangan bank dan non bank dapat membantu keberhasilan UMKM untuk bersaing dalam ekonomi global sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang masih tergolong *unbanked* (Yanti, 2019); (Arafah *et al.*, 2022). Akses yang luas terhadap lembaga keuangan merupakan hal penting untuk meningkatkan kinerja sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM (Suri & Berliana, 2023). Dengan demikian, Inklusi keuangan syariah berupa penyediaan akses bagi masyarakat miskin agar dapat memiliki dan dapat menggunakan layanan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Namun, kenyataannya masyarakat juga memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan syariah, dikarenakan tingginya *unbankable people* disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi, rendahnya pembiayaan, suku bunga kredit mikro tinggi, *asymmetric information*, kemampuan manajemen masyarakat yang kurang memadai, monopoli bank pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan syariah lainnya (Canon *et al.*, 2023). Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya pengimplementasian inklusi keuangan syariah. Dimana, inklusi keuangan syariah termasuk dalam program literasi keuangan dikarenakan peningkatan inklusi keuangan syariah yang semakin meningkat maka dapat meningkatkan stabilitas ekonomi bagi suatu negara. Inklusi keuangan syariah juga menjadi elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat, yang perlu mendapat dukungan modal agar dapat membesarkan usaha dan membantu kinerja usahanya dengan tujuan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022, indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia mencapai 12,12% yang menyatakan bahwa inklusi keuangan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional yang disebabkan oleh pemahaman masyarakat mengenai inklusi keuangan syariah masih sangat rendah. Pada gambar 1 terlihat bahwa tahun 2016 ke tahun 2022 indeks inklusi keuangan syariah mengalami fluktuasi, sedangkan indeks inklusi keuangan konvensional mengalami peningkatan. Dimana, tahun 2016 indeks inklusi keuangan syariah mencapai 11,1%, sedangkan indeks inklusi keuangan konvensional mencapai 67,8%. Sementara itu, tahun 2019 mengalami penurunan terhadap indeks inklusi keuangan syariah menjadi 9,10%, yang berarti mengalami selisih penurunan indeks inklusi keuangan dari tahun 2016 ke tahun 2019 sebesar 2%. Sedangkan, inklusi keuangan konvensional mengalami peningkatan mencapai 76,19%, yang berarti mengalami selisih peningkatan indeks inklusi

keuangan konvensional dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 8,39%. Disamping itu, tahun 2022 indeks inklusi keuangan syariah mencapai 12,12% yang berarti mengalami selisih peningkatan terhadap indeks inklusi keuangan syariah dari tahun 2019 ke tahun 2022 sebesar 3,02%, sedangkan indeks inklusi keuangan konvensional mengalami peningkatan kembali menjadi 85,10%, yang berarti mengalami selisih peningkatan indeks inklusi keuangan konvensional dari tahun 2019 ke tahun 2022 sebesar 8,91%.

Sumber: Otoritas Jasa keuangan (OJK), 2022

Gambar 1. Indeks Inklusi Keuangan Syariah dengan Indeks Inklusi Keuangan Konvensional Tahun 2016-2022

Dengan demikian, inklusi keuangan syariah merujuk pada misi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan, tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpenghasilan rendah atau kalangan miskin. Hal inilah yang menyebabkan perlunya peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat khususnya pada remaja masjid Jami' Ulayat, guna memahami bahwa Inklusi keuangan syariah menjadi elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini berupa metode pengajaran dilakukan di dalam ruangan guru dengan menggunakan slide dan presentasi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan ± 3 bulan dimulai dari 28 Agustus 2023 sampai 28 November 2023 dengan dihadiri oleh para remaja Masjid Jami' Ulayat Percut Sei Tuan. Kegiatan pengabdian ini berupa penyampaian materi pokok mengenai inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu:

Gambar 2. Skema Tahapan Kegiatan dalam Pengabdian di Masjid Jami' Ulayat

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Masjid Jami' Ulayat, antara lain:

1. Tahapan pertama berupa pra kegiatan yaitu observasi langsung ke lokasi Masjid Jami' Ulayat untuk melakukan peninjauan lokasi sekolah. Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah dan peninjauan *literature*.
2. Tahapan kedua yaitu inti dari kegiatan pengabdian ini berupa pelaksanaan kegiatan utama dengan melakukan penyampaian materi melalui slide persentase dan tahapan ketiga ialah pasca kegiatan yang dilakukan dengan mengevaluasi pemahaman para remaja Masjid Jami' Ulayat dalam memahami inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat.
3. Tahapan ketiga yaitu evaluasi. Tahapan ini berupa laporan dari hasil pengabdian masyarakat di Masjid Jami' Ulayat mengenai peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat di remaja Masjid Jami' Ulayat Percut Sei Tuan di mulai dengan penyampaian materi dasar berupa (1) defenisi dan tujuan dari inklusi keuangan syariah, (2) tujuan dan manfaat inklusi keuangan syariah, (3) program inklusi keuangan syariah, (4) perilaku keuangan pribadi dan (5) perbedaan inklusi keuangan dengan inklusi keuangan syariah, (6) faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan syariah, (7) landasan hukum inklusi keuangan syariah, (8) cara meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Berikut ini gambar yang menunjukkan proses penyampaian materi di Masjid Jami' Ulayat.

Gambar 3. Proses Penyampaian Materi di Masjid Jami' Ulayat

Setelah dilaksanakannya penyampaian materi, selanjutnya dilaksanakannya evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan intruksional dicapai seseorang yang bertujuan dalam memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan dengan memperbaiki kekurangan kendala, baik dalam proses administrasi maupun manajemen. Pada kegiatan evaluasi ini para remaja Masjid Jami' Ulayat diarahkan dan dipastikan sudah memahami materi yang disampaikan berupa pemahaman mengenai peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat. Pemahaman mengenai inklusi keuangan syariah ini sangat diperlukan oleh para remaja Masjid Jami' Ulayat dalam kehidupannya dikarenakan inklusi keuangan syariah ini dapat merubah pola pikir pelaku usaha tentang cara melihat uang dan laba, dengan pola pikir tersebut maka akan merubah pelaku ekonomi menjadi responsif.

Gambar 4. Evaluasi Penyampaian Materi Masjid Jami' Ulayat

Pembahasan

Inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan akses terhadap produk keuangan syariah yang sesuai termasuk pembiayaan, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang (CFI, 2016). Konsep inklusi keuangan syariah berkembang menjadi beberapa tujuan, yaitu: (1) Akses keuangan yang mudah untuk semua rumah tangga dan perusahaan. (2) Institusi yang sehat dengan berpedoman pada pengaturan dan pengawasan kehati-hatian. (3) Keberlanjutan keuangan dan kelembagaan lembaga keuangan syariah. (4) Persaingan antara penyedia layanan untuk menghadirkan alternatif bagi pelanggan.

Inklusi keuangan syariah ini menjadi elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat khususnya pada para pelaku usaha seperti UMKM, yang perlu mendapat dukungan modal agar dapat membesarkan usaha dan membantu kinerja usahanya dengan tujuan demi tercapainya kesejahteraan UMKM-nya (Iqbal & Sami, 2017).

Inklusi keuangan memiliki indikator yang multidimensi, beberapa faktor dominan sebagai keterwakilan dari indikator multidimensi disebut para peneliti sebelumnya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari *et al.*, (2020) mengemukakan terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mewakili multidimensi dari keuangan inklusif yaitu

1. Indikator aksesibilitas (*accessibility*) adalah dimensi aksesibilitas merupakan dimensi paling utama dalam indikator inklusi keuangan. Dimensi ini digunakan untuk mengukur penetrasi keuangan syariah pada masyarakat. Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin. Oleh karena itu sistem keuangan harus menjangkau secara luas di antara penggunanya. Indikator dimensi ini diwakili oleh jumlah rekening deposit per 1.000 jumlah penduduk dewasa.
2. Ketersediaan (*availability*) adalah dimensi yang digunakan dalam sistem keuangan yang inklusif, jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna. Dimensi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat dan mampu menggunakan jasa lembaga keuangan formal, atau sejauh mana ketersediaan layanan dari lembaga keuangan formal dalam melayani kebutuhan masyarakat.
3. Kemanfaatan (*usage*) dari layanan perbankan adalah Dimensi ini merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sekaligus mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, meliputi: keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Penggunaan (D3) yaitu dimensi untuk mengukur sejauh mana penggunaan jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa pembiayaan (*financing*) (Puspitasari *et al.*, 2020). Indikator dalam dimensi penggunaan adalah jumlah pembiayaan (*financing*) Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam milyar rupiah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, yaitu : (1) Peningkatan pangsa pasar syariah. Market share industri jasa keuangan syariah masih relative kecil yaitu sebesar 9,90 persen dari aset industry keuangan nasional. (2) Peningkatan modal inti lembaga keuangan syariah. Permodalan masih terbatas. Dimana, terdapat 6 bank syariah yang memiliki modal

inti di bawah Rp 2 Triliun dari total 14 Bank Umum Syariah per Desember 2020. (3) Peningkatan sumber daya di keuangan syariah. Terbatasnya sumber daya di Industri Keuangan Syariah antara lain kebutuhan sumber daya manusia andal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan syariah. (4) Peningkatan competitiveness agar bersaing dengan konvensional. Tingkat kompetisi layanan keuangan syariah di bawah konvensional. Dalam hal ini, diversifikasi produk keuangan syariah dan business matching menjadi hal yang sangat krusial. (5) R&D keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah diharapkan selalu melakukan riset dan pengembangan keuangan syariah yang lebih inovatif lagi (Fitriah & Ichwanudin, 2020).

Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terdapat tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, yaitu : (Septiani & Wuryani, 2020): (1) Mendukung permodalan Usaha. Lembaga keuangan syariah perlu mendukung permodalan untuk pertumbuhan usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta belum optimalnya pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah oleh pemerintah. Dan keterbatasan produk permodalan atau pembiayaan dengan harga yang kurang kompetitif. (2) Peningkatan peran sukuk korporasi. Peran sukuk korporasi dan saham syariah yang masih belum optimal. Dalam hal ini, penerbitan sukuk terutama sukuk korporasi dan jumlah investor yang masih minim, pasar sekunder belum likuid, dan terdapat ketidakpastian terkait aspek perpajakan untuk struktur akad tertentu dalam penerbitan sukuk. (3) Peningkatan penggunaan dana sosial keagamaan. Regulasi yang belum spesifik terutama dalam mengatur wakaf tunai untuk diinvestasikan pada aset tetap seperti real estate, dan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dana sosial keagamaan. (4) Peningkatan sistem teknologi dan informasi. Lembaga keuangan syariah masih belum memilih sistem teknologi informasi yang memadai, sehingga menyebabkan layanan keuangan syariah belum bekerja secara maksimal dan sistem pengawasannya juga belum efektif.

KESIMPULAN

Inklusi keuangan syariah ini menjadi elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat khususnya pada para pelaku usaha. Penggunaan fasilitas lembaga keuangan bank dan non bank dapat membantu keberhasilan masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk bersaing dalam ekonomi global sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang masih tergolong *unbanked*. Dengan kata lain, inklusi keuangan syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat. Dan Inklusi keuangan syariah termasuk dalam program literasi keuangan syariah, dikarenakan jika peningkatan inklusi keuangan syariah semakin meningkat maka akan meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat bagi suatu negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan maksimal dan lancar karena adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari beberapa pihak yang turut membantu dalam terlaksananya kegiatan abdimas ini sehingga team pengabdian masyarakat ini mengucapkan terima kasih kepada; pertama, pihak LPPM Universitas Potensi Utama selaku yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, kedua, pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Khususnya Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ka. Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungannya pada pengabdian masyarakat ini dan ketiga, pihak Masjid Jami' Ulayat yang telah memberikan izin dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, sehingga kegiatan abdimas ini dapat berjalan lancar dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, S., Miko, J., & Syafitri, E. (2022). Implementasi Personal Branding dalam Meningkatkan Kredibilitas Jiwa Entrepreneurship di Era Digital. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–123.
- Canon, S., Arisandi, D., Fauza, M., & Sopingi, I. (2023). Dinamika Ekonomi Mikro Syariah: Prinsip, Aplikasi dan Implementasi. In *NBER Working Papers* (1st ed.). PT Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Fitriah, & Ichwanudin, W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan (Studi Pada Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). *Jurnal Riset Dan Manajemen Tirtayasa*, 4(2), 94–108. <https://doi.org/10.48181/jrbmt.v4i2.10332>
- Hidayanti, A. (2018). Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Iqbal, B. A., & Sami, S. (2017). Role of Banks in Financial Inclusion in India. *Contaduria y Administracion*, 62(2), 644–656. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.007>
- Islamiah, N. (2021). *Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi, Dampaknya terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Rosidayanti, Sopingi, I., & Haryanti, P. (2023). Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah melalui Penyaluran Dana Kepada UMKM : Studi Kasus Pada BWM Tebuireng Jombang. *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(2), 165–180. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i2.474>
- Sa'adah, H., & Sopingi, I. (2019). Marketing Mix-7P dan Religi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Survey Pada PT. Bank BRISyariah KCP Wahid Hasyim Jombang). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.8089>

- Sopingi, I., Ratnasari, R. T., & Mawardi, I. (2023). Analysis of the Implementation of Subsidized Homeownership Credit Financing Based on the Concept of Maslahah 1. *Malia : Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 17–33. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3267>
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.226>
- Yanti, W. I. P. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>